

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Ditetapkan



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/SUASANA-Rapat-Paripurna-penyampaian-Raperda-Perubahan-APBD-2024-1.jpg>

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tanah Laut (Tala) TA. 2024 resmi ditetapkan pada rapat paripurna di Gedung Rapat Paripurna DPRD Tala, Rabu (14/8/2024) dini hari.

Penandatanganan berita acara antara Penjabat (Pj) Bupati Tala, H. Syamsir Rahman bersama Pimpinan DPRD Tala menandai pengambilan keputusan terhadap raperda tersebut.

Syamsir menekankan kepada setiap kepala SKPD serta seluruh jajaran agar dapat melaksanakan setiap program, kegiatan hingga sub kegiatan seiring dengan penetapan perubahan APBD ini.

“Jangan sampai ada yang tidak terealisasi, laksanakan dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, agar realisasi nantinya dapat berjalan optimal, harus dipersiapkan dengan matang.

“Perubahan tahun ini lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga masih banyak waktu untuk memaksimalkan kegiatan,” sambungnya.

Adapun setelah proses panjang pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tala dan jajaran terkait hingga akhirnya sampai pada penetapan ini, disepakati besaran target pendapatan daerah pada tahun 2024 setelah adanya Perubahan APBD yakni sebesar Rp2.116.695.299.448

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Gerak cepat dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), dalam pengalokasian penganggaran tambahan triwulan keempat tahun 2024.

Setelah awal pekan tadi dilakukan penandatanganan nota persetujuan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Kebijakan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAD) APBD 2024, pada Kamis (8/8/2024), pemerintah daerah setempat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2024.

Penyampaian raperda tersebut dilakukan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tala Ir M Faried Widyatmoko mewakili Pj Bupati yang berhalangan hadir karena ada undangan penting di Jakarta yakni menerima penghargaan UHC dari pemerintah pusat yang diserahkan Wapres RI KH Ma'ruf Amin.

Rapat paripurna yang berlangsung di gedung rapat paripurna DPRD Tala tersebut dipimpin Ketua DPRD Tala Muslimin SE didampingi dua wakil ketua, Drs H Atmari dan H Rahimullah SE.

Secara umum pada Raperda Perubahan APBD 2024 tersebut disampaikan paparan pendapatan sebesar Rp 2.106.571.076.138. Ini mengalami kenaikan sebesar Rp 124.223.310 atau 0,01 persen jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD 2024.

Kemudian anggaran belanja daerah sebesar Rp 2.781.439.035.762 menjadi Rp 2.882.006.377.595 atau naik 3,62 persen. Tercatat, defisit tahun 2024 sebesar Rp 775.311.078.147 menjadi Rp 824.623.610.237 atau menjadi 5,73 persen.

Seluruh fraksi DPRD Tala menyampaikan pemandangan umumnya setelah menyimak penyampaian Raperda Perubahan APBD 2024 tersebut. Beberapa saran penting dilontarkan fraksi-fraksi, sebagai berikut:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

- Pelaksanaan belanja pada APBD perubahan tahun 2024 ini harus benar-benar ada yang diprioritaskan, namun bagaimana strategi pemerintah dalam upaya pemenuhan pelayanan publik, percepatan pencapaian prioritas pembangunan daerah serta target pertumbuhan ekonomi Tala.

- Anggaran harus digunakan dengan target kinerja yang terukur, penggunaan anggaran tidak mengabaikan skala prioritas dengan memperhatikan keadaan keuangan daerah. Sehingga perlu penataan sesuai keuangan, dan monitoring serta pengawasan perlu ditingkatkan.

- Skala prioritas harus diperhatikan dan sesuai prosedur sehingga tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku, perhatikan kinerja OPD, cermati progress tiap kegiatan. Juga harus sesuai musrenbang di tiap tingkatan, prioritas pembangunan SDM dan infrastruktur.

FRAKSI GERINDRA

- Berhubung dalam RAPBD perubahan Tahun Anggaran 2024 terjadi beberapa perubahan yang meliputi antara lain pergeseran antarjenis antarkegiatan, antarprogram, antarunit organisasi maupun pengurangan dan atau penambahan jumlah alokasi anggaran,

maka perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus benar-benar berbasis kinerja atau berbasis prestasi kerja.

- Kegiatan yang akan dilaksanakan harus diutamakan untuk kepentingan masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan Ekonomi. Hal yang perlu diperhatikan bahwa dalam pengalokasian dan penganggaran belanja pada perubahan APBD Tahun 2024 ini agar sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.

- Berkaitan belanja modal, hendaknya program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD Perubahan ini dikelola serius dan mendapatkan hasil yang optimal, sebab batas waktunya sangat terbatas, jangan sampai terjadi banyak kegiatan yang belum sempat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

- Berkaitan belanja hibah agar lebih selektif dalam menentukan penerima serta memperhatikan azas kelayakan dan keadilan. Begitu pula laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut yang disampaikan oleh penerima hibah.

- Terkait pengeluaran pembiayaan daerah, dalam pelaksanaannya nanti harus dikawal dan dimonitor serta kalau perlu diaudit karena dananya bersumber dari APBD Tala.

- Pada 5 Agustus 2024 telah ditandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 dalam sidang Paripurna DPRD Tala sehingga dipedomani dan diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan APBD Tahun 2024.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

- Perubahan APBD ini merupakan hasil penyesuaian rencana kegiatan dan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kegiatan masyarakat dan pelayanan publik.

- Melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan pemerintah bersama DPRD diharapkan program-program kerja pada kegiatan yang dilaksanakan akan memberikan hasil yang maksimal dan jauh lebih baik.

- Dengan memperhatikan pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, pendapatan daerah di proyeksikan sebesar Rp 2.106.695.299.448 mengalami kenaikan sebesar Rp 124.223.310 atau 0,01 persen jika dibandingkan target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.106.571.076.138.

- Pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 belanja Daerah di rencanakan sebesar Rp 2.882.006.377.595 mengalami kenaikan sebesar Rp 100.567.341.833 atau naik sebesar 3,62 persen jika dibandingkan anggaran belanja APBD 2024 sebesar Rp 2.781.439.035.762.

- Penyusunan dan perencanaan proyeksi belanja harus berdasarkan kepada pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berarti tiap rupiah yang di alokasikan harus jelas target dan sasaran yang akan dicapai.

- Mengingat sebagian besar SKPD serapan anggarannya masih di bawah 50 persen, sedangkan saat ini sudah bulan kedelapan, apa kendalanya.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

- Hingga Juli 2024 serapan masih di bawah 50 persen, sedangkan pada draft raperda APBD Perubahan mengajukan penambahan lagi. Dengan sisa waktu yang ada apakah kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

- Memperhatikan beberapa pembangunan beberapa waktu ini, ke depan perlu ada perbaikan dalam perencanaan pembangunan serta berharap tiap bangunan yang dirancang bisa tuntas dan tidak menyisakan masalah.

- Pemanfaatan aset khususnya bangunan gedung harus dikaji dan direncanakan dengan baik.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- Realisasi penerimaan pendapatan daerah hingga 31 Juli 2024 telah mencapai Rp 1.583.809.191.832 dari target pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.106.571.076.138 atau 75,18 persen. Karenanya perlu adanya saling bekerja sama antarstakeholder agar pendapatan daerah terus meningkat.

- Terkait belanja daerah yang direncanakan naik 3,62 persen dari anggaran semula, pemerintah daerah diharapkan melakukan upaya untuk percepatan pembangunan yang telah direncanakan agar sesuai target secara waktu dan serapan anggaran yang maksimal serta memastikan kegiatan belanja benar-benar dapat dilaksanakan.

-Terkait perubahan anggaran belanja harus dilakukan secara selektif. Harus melihat kebutuhan dan tidak ada program yang dipaksakan, serta berhati-hati dalam mengalokasikan nominal anggaran mengacu skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah sehingga postur perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terkelola dengan baik.

- Hendak pemerintah daerah dapat mempercepat dalam upaya memaksimalkan realisasi anggaran berjalan yang saat ini masih rendah dan segera melaksanakan program kegiatan yang telah dianggarkan.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- Dengan adanya beberapa keadaan yang memungkinkan terjadinya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 akan mengalami berbagai perubahan, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

- Dalam penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini diupayakan agar setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan harus benar-benar terukur, jelas indikator, target dan kinerjanya serta memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan yang tersisa akhir tahun dan tepat dalam komponen belanjanya.

- Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ke depannya lebih fokus lagi menempatkan prioritas pengalokasian anggarannya dengan tepat sasaran untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan yang menggambarkan kebutuhan masyarakat dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FRAKSI NASDEM

- Pada perubahan APBD 2024 hendaknya pemerintah daerah dan SKPD terkait selaku pengguna anggaran memastikan semua program prioritas segera tertuntaskan secara optimal serta terlaksana tertib aman dan bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dimana program tersebut terlaksana.

- Terkait pembiayaan daerah penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp 30 milyar, diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah pada tahun berikutnya

- Terkait penyertaan modal kepada PT Air Minum Berkah Banua (Perseroda) sebesar Rp 10 miliar, diharapkan dapat memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat agar keluhan kenaikan tarif yang sudah diterapkan dapat terakomodasi karena pelayanan yang memuaskan masyarakat.

- Penggunaan SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2024 sebesar Rp 775.311.078.147 hendaknya pemerintah daerah bersama SKPD terkait lebih bekerjasama dalam peningkatan pendapatan asli daerah agar dalam penganggaran selanjutnya tidak terjadi defisit anggaran.

FRAKSI PEMBANGUNAN DEMOKRAT

- Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya ini tentunya sudah sesuai yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Dengan adanya beberapa keadaan yang memungkinkan terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 akan mengalami perubahan baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Sumber Berita

1. <https://www.inspirasitala.co.id/perubahan-apbd-tala-2024-ditetapkan/>, Perubahan APBD Tala 2024 Ditetapkan, (14/08/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/08/09/eksekutif-sampaikan-rancangan-perubahan-apbd-2024-ini-saran-penting-fraksi-fraksi-dprd-tala?page=all>, Eksekutif Sampaikan Rancangan Perubahan APBD 2024, Ini Saran Penting Fraksi-fraksi DPRD Tala, (09/08/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Laporan realisasi semester pertama menjadi dasar perubahan APBD.
- 2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

- d) keadaan darurat; dan/atau
- e) keadaan luar biasa